

BAB II

HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA MELANESIA SEBELUM ERA PRESIDEN JOKO WIDODO

Hubungan luar negeri antar negara berdaulat tentu saja memiliki latar belakang mengapa negara-negara tersebut berinteraksi dan melakukan hubungan internasional. Begitupun dengan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara Melanesia. Hubungan tersebut tidak selalu berjalan mulus, banyak dinamika yang mewarnainya sehingga kawasan ini sempat dianggap sebagai “halaman belakang” Indonesia dan tidak masuk dalam lingkaran konsentris fokus politik luar negeri Indonesia. Selain itu sejarah dan perkembangan Melanesia juga menjadi alasan Indonesia dalam hubungan luar negerinya dengan negara-negara Melanesia. Maka pada BAB II ini akan mengulas mengenai sejarah dan perkembangan Melanesia serta hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara Melanesia sebelum era Presiden Joko Widodo.

A. Melanesia : Sejarah dan Perkembangannya

1. Sejarah Melanesia

Melanesia merupakan salah satu ras besar yang menghuni kawasan Kepulauan Pasifik Selatan, yang terbentang dari Maluku hingga Fiji, selain ras Melanesia kawasan Pasifik Selatan juga di huni oleh ras Polinesia dan ras Mikronesia. Ras Melanesia bercirikan kulit gelap, rambut keriting, dan bertubuh atletis. Ras Melanesia juga terbagi-bagi ke dalam suku yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di kepulauan-kepulauan di kawasan Pasifik Selatan. Hal yang menyatukan ras ini adalah akar budaya dan persamaan nasib.

Seperti yang kita ketahui bahwa selama berabad-abad kawasan Pasifik Selatan menjadi daerah kolonisasi bangsa-bangsa Barat, seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Australia. Sumber daya alam mereka dikeruk demi

kepentingan negara penjajah dan bangsa pribuminya menjadi budak di negeri sendiri. Kemudian hal tersebutlah yang menjadi dasar atas persamaan nasib dan perjuangan bersama untuk membebaskan ras Melanesia dari penguasaan ras lain.

Di kawasan Pasifik Selatan sendiri terdapat tiga pembagian kelompok geokultural (ras), yaitu Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Pembagian ini sendiri sudah bertahan selama kurang lebih 200 tahun lamanya. Pada mulanya, pembagian tersebut dilakukan oleh penjelajah-penjelajah Perancis, terutama Jules-Sébastien César Dumont D'Urville. Namun banyak pihak yang menilai bahwa D'Urville menciptakan pembagian ini berdasarkan sistem yang sudah ada sebelumnya yang lebih berdasar pada faktor-faktor kultural dan rasial daripada faktor geografi (Clark, 2003, p. 38). Karena Melanesia sendiri memiliki arti "Pulau-Pulau Hitam" yang merujuk pada warna kulit masyarakat yang tinggal dikawasan tersebut.

Tetapi penggunaan istilah-istilah Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia tetap saja digunakan bahkan hingga saat ini dikarenakan belum ada alternatif yang lebih baik dari istilah-istilah tersebut. Seorang ahli Mikronesia menyatakan bahwa bertahannya istilah-istilah ini membuktikan kekuatan dari pengaruh-pengaruh colonial di kawasan tersebut. Namun begitu, Ia juga berpendapat bahwa memang belum ada istilah lain yang lebih memuaskan daripada ketiga istilah ini untuk mendeskripsikan kawasan Pasifik Selatan (Hanlon, 2009, p. 92).

Banyak juga ahli lain yang menolak pembagian antara Polinesia dan Melanesia dengan dasar pemikiran bahwa pembagian etnis dan budaya menurut mereka tidaklah terlalu meyakinkan apalagi jika diselidiki secara sungguh-sungguh. Nicholas Thomas mencatat bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu telah muncul sebuah kesepakatan bersama terutama diantara para antropolog tentang betapa tidak membantunya dan bahkan palsunya pembagian

wilayah Pasifik menjadi wilayah etnis dan kebudayaan Melanesia dan Polinesia (Thomas, 1989, p. 27).

Menurut Clive Moore, Melanesia adalah sebuah kenyataan di wilayah Pasifik Selatan yang baru saja didekolonisasi, dimana orang-orang mendeskripsikan dirinya dan masa depannya sebagai bangsa Melanesia setelah lepas dari bangsa penjajah (More, 2003, pp. 3-4). Tarcisius Kabutaulaka, seorang akademisi kelahiran Kepulauan Solomon juga mengatakan bahwa meski asalmuasalnya dari Eropa dan bersifat rasis, Melanesia adalah istilah yang memberdayakan dan menjadi fokus dari identitas orang-orang yang dikelompokkan ke dalam wilayah Melanesia (Crocombe, 2001, p. 146).

Para ahli kepulauan Pasifik sangat sadar bahwa skema Dumont d'Urville yang membagi wilayah Pasifik menjadi tiga bagian bukanlah semata latihan dalam analisis geografi fisik. Justru, dia mengklaim bahwa skemanya memberikan model alami karena skema d'Urville dibuat berdasarkan "jenis dan karakteristik penduduk daripada sekadar pembagian geometris" (Quanchi & Robson, 1992, p. 173).

Dumont d'Urville menjelaskan batas-batas geografis dari setiap pengelompokan ini kecuali bahwa pada versi aslinya mengenai Melanesia, Ia memasukkan juga Australia sehingga Aborigin Australia dan orang-orang dari pulau di Selat Torres sebagai Melanesia. Sekarang hal ini sudah tidak berlaku lagi, dengan Melanesia sekarang hanya terbatas pada wilayah pulau Papua (Papua Nugini dan Papua Barat serta pulau-pulau kecil yang mengelilinginya), Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru dan kadang sedikit ambigu juga memasukkan Fiji kedalamnya.

"Jalan Melanesia" atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Melanesian Way* mulai populer terutama lewat serangkaian artikel yang ditulis oleh Bernard Narokobi seorang intelektual asal Papua Nugini yang dipublikasikan di harian *Post-Courier* antara tahun 1976-1978 tidak lama

setelah Papua Nugini mendapatkan kemerdekaan dari Australia. Tujuan utama dari penegasan gagasan Jalan Melanesia adalah sebagai berikut :

“Berabad-abad lamanya, orang-orang Melanesia telah melihat diri mereka dari gambaran dan tulisan yang dibuat oleh orang asing. Orang-orang Melanesia sedang berjalan di bawah bayang-bayang para pengamat Barat, hidup di dalam visi dan mimpi yang diimpikan oleh orang Barat. Kalau tidak berhasil mendirikan dasar filsafat berdasar pada kearifan masa lalu, kita akan punah sebagai orang-orang yang berkualitas, berwatak dan yang memiliki dinamisme yang unik” (Narokobi, 1980, p. 4).

Kesimpulannya, konstruksi pemikiran tentang identitas Melanesia yang positif telah muncul selama 50 tahun terakhir sebagai usaha dari masyarakat ras Melanesia itu sendiri. Dalam perjalanannya, identitas Melanesia ini telah diwarnai oleh dinamika anticolonial yang muncul dikalangan Melanesia dan kemudian ditegaskan sebagai lawan terhadap “yang lain Eropa” yang direpresentasikan oleh agen-agen kekuatan kolonial di kawasan ini. Setidaknya, inilah fokus dari banyak kajian antropologi. Hal yang sangat penting tapi jarang diakui dalam pembentukan identitas diri Melanesia ini adalah dinamika hubungan yang muncul dengan ‘yang lain Polinesia’. Penegasan ke-Melanesia-an atau Melanesianisme mungkin merupakan respon kepada salah satu atau dua fenomena ini, tergantung pada konteks (Lawson, 2013, p. 22).

1. Perjuangan Dekolonisasi

Dekolonialisasi merupakan isu yang mulai muncul dan hangat diperbincangkan di kawasan Pasifik Selatan antara tahun 1960-an hingga 1980-an. Proses dekolonialisasi di kawasan ini ternyata berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan dekolonialisasi bagi bangsa-

bangsa di kawasan Asia. Beberapa wilayah di kawasan Asia telah menjadi negara merdeka pasca berakhirnya Perang Dunia II di tahun 1945, sedangkan wilayah-wilayah di kawasan Pasifik Selatan malah justru dikembalikan pada kepada negara penjajahnya terdahulu, sekalipun dengan status daerah mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Oleh karena hal tersebut, maka setelah Perang Dunia II berakhir, Inggris, Australia, Selandia Baru, yang tergabung dalam negara-negara persemakmuran, kembali menguasai wilayah-wilayah jajahannya di Pasifik Selatan berdasarkan mandate dari PBB. Demikian juga dengan Amerika Serikat dan Perancis, kembali menguasai wilayah-wilayah di Kepulauan Pasifik Selatan. Hal tersebut juga dialami oleh negara-negara Melanesia yang mengalami masa dekolonisasi pada tahun antara 1960-1980an, ada yang meraih kemerdekaan karena diberikan kepercayaan oleh negara penjajah tetapi ada pula yang harus melakukan usaha hingga bertumpah darah untuk meraih kemerdekaannya.

Perang Dunia II meskipun merenggut jutaan jiwa di kawasan Pasifik Selatan, namun membawa berkah tersendiri bagi rakyat Pasifik Selatan. Perang Dunia II telah mengubah “wajah” kolonialisasi di wilayah tersebut. Negara-negara kolonial mulai menyadari besarnya bantuan penduduk Pasifik Selatan kepada mereka dalam menghadapi invasi Jepang ketika Perang Pasifik berlangsung antara tahun 1942-1945, serta nilai strategis letak geografisnya. Rehabilitasi wilayah-wilayah yang rusak sebagai akibat perang, dan juga pemulihan kondisi sosial ekonomi penduduk Pasifik Selatan kemudian menjadi prioritas negara-negara kolonial tersebut dengan membentuk *South Pacific Commission (SPC)* di tahun 1947 (Moon, 2017).

SPC merupakan sarana negara-negara kolonial untuk membentuk kebijakan bersama seputar pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah Pasifik

Selatan. Organisasi ini memiliki peranan yang sangat penting, karena secara tidak langsung telah membantu persiapan kemerdekaan negara-negara jajahan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sosial ekonomi mereka. Hal tersebut didukung dengan dikeluarkannya resolusi PBB pada 14 Desember 1960, yang mengisyaratkan perlunya negara-negara kolonial mempersiapkan upaya-upaya untuk mengatasi kekurangan dibidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan, yang dapat menunda kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan kemerdekaan bagi negara-negara di Pasifik Selatan, SPC kemudian memiliki fungsi sebagai badan penasehat dan konsultatif yang berkaitan erat dengan program-program terkoordinasi antara negara-negara kolonial dan wilayah-wilayah jajahan.

Kecuali Irian Barat (Papua) yang dikembalikan oleh Belanda ke Indonesia di tahun 1962, proses dekolonisasi di beberapa kawasan Pasifik Selatan berlangsung dengan damai dan lancar, hal ini karena negara-negara kolonial-lah yang mengajukan gagasan dekolonisasi (Hamid, 1996, p. 43). Australia melaksanakan kebijaksanaan dekolonisasi sejak tahun 1968, setelah diperintah oleh tiga kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1975, setelah satu tahun melaksanakan pemerintahan sendiri. Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia tersebut terjadi pada 16 September 1975.

Sementara itu Inggris mulai melakukan dekolonisasi di tahun 1970, dengan memberikan kemerdekaan pada Fiji. Kemudian di tahun 1976 memberikan kemerdekaan kepada Kepulauan Salomon. Di Vanuatu, kebijaksanaan dekolonisasi Inggris memerlukan penyesuaian dengan kebijaksanaan kolonial Perancis. Hal ini disebabkan Vanuatu dijajah dengan satu-satunya sistem penjajahan di dunia, yang dinamakan Kondominium. Dalam hal ini, Vanuatu dijajah oleh dua kekuasaan kolonial Inggris dan Perancis. Vanuatu

kemudian mendapatkan kemerdekaannya di tahun 1980 (Adil, 1993, p. 74).

Proses dekolonisasi di Vanuatu tidak berjalan mulus, hal tersebut dikarenakan Partai Nasional New Hebrides yang salah satu pendirinya adalah Pastor Walter Lini yang kemudian menjadi Perdana Menteri Berganti nama menjadi Pati Vanua'aku, Partai mendorong agar kemerdekaan dapat diraih pada tahun 1980. Sebelum kemerdekaan Vanuatu, pulau-pulau tersebut dikenal sebagai *New Hebrides*. *The New Hebrides* diperintah oleh kondominium dari Perancis dan Inggris. Pada tahun 1980, Perancis dan Inggris sepakat bahwa Vanuatu akan diberi kemerdekaan pada tanggal 30 Juli 1980 dan dibentuklah Republik Vanuatu.

Namun tidak semua sepakat dengan pembentukan Republik ini, pada Juni 1980, Jimmy Stevens, kepala gerakan Nagriamel, memimpin pemberontakan terhadap para pejabat kolonial dan rencana untuk kemerdekaan. Pemberontakan berlangsung sekitar 12 minggu. Para pemberontak memblokir Santo-Pekoa Bandara Internasional, menghancurkan dua jembatan, dan menyatakan kemerdekaan Espiritu Santo pulau sebagai "Negara Vemerana", Stevens didukung oleh berbahasa Perancis pemilik tanah dan oleh Yayasan Phoenix, sebuah yayasan yang mendukung bisnis Amerika pembentukan sebuah libertarian surga pajak di *New Hebrides*.

Pada tanggal 8 Juni 1980, pemerintah *New Hebrides* meminta Inggris dan Perancis untuk mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan di pulau Espiritu Santo. Perancis menolak untuk mengizinkan Inggris untuk menggelar pasukan untuk meredakan krisis, dan tentara Perancis ditempatkan di Espiritu Santo namun tidak mengambil tindakan apapun. Saat menjelang hari kemerdekaan, dengan Perdana Menteri terpilih Walter Lini, hanya Papua Nugini yang mengirim pasukan untuk ikut campur. Sebagian Papua Nugini tentara mulai tiba di Espiritu Santo, pers asing menyebut peristiwa yang sedang

berlangsung sebagai "Perang Kelapa". Namun, "perang" itu singkat dan tidak konvensional.

Masyarakat Vanuatu umumnya menyambut tentara Papua Nugini sebagai sesama Melanesia. Pengikut Stevens hanya dipersenjatai dengan busur dan panah, batu, dan sling. Ada beberapa korban dari perang tersebut salah satunya anak dari Jimmy Stevens. Ketika sebuah kendaraan yang membawa anak Stevens meledak karena ranjau tentara Papua Nugini pada akhir Agustus 1980, kemudian tentara menembaki kendaraan dan membunuh anak Stevens. Tidak lama kemudian, Jimmy Stevens menyerah dan menyatakan bergabung dengan Vanuatu.

Namun tidak semua wilayah yang mayoritas penduduknya ras Melanesia telah meraih kemerdekaan dan bebas untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya sendiri, wilayah tersebut yaitu Kalodonia Baru yang masih dikuasai oleh Perancis dan Papua Barat yang masih dikuasai oleh Indonesia. Untuk memperkuat posisi dan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas negara-negara Melanesia, serta untuk membantu saudara-saudara Melanesia mereka yang masih dikuasai oleh bangsa lain maka pada tahun 1988 dibentuklah organisasi subregional dikawasan Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara Melanesia yaitu *Melanesian Spearhead Group (MSG)*.

2. *Melanesia Spearhead Group (MSG)*

Melanesian Spearhead Group atau yang biasa disingkat MSG ini merupakan organisasi subregional di kawasan Pasifik Selatan yang beranggotakan negara-negara Melanesia. Terdapat beberapa peristiwa penting yang mendahului pembentukan organisasi politik subregional ini, diantaranya yaitu pidato Lini tentang sosialisme Melanesia yang disampaikan di Canberra pada tahun 1982, kemudian kemerdekaan Papua Nugini dari Australia (1975), Kepulauan Solomon dari Inggris (1978), dan Vanuatu dari kondonium Inggris dan Perancis (1980).

Gambar 1.2 Logo *Melanesian Spearhead Group (MSG)*



Melanesian Spearhead Group

Sumber : <http://www.msgsec.info/>

Pembentukan awal MSG dimulai dengan sebuah pertemuan informal pada tahun 1986 namun mencerminkan sebuah manifestasi penting sebuah ideologi Melanesianisme dalam politik kawasan yang tengah berkembang. Pada saat rapat perdana MSG, Perdana Menteri Papua Nugini Somare, yang juga merupakan tokoh penting dalam menginisiasi MSG menegaskan bahwa semangat persaudaraan dan solidaritas Melanesia telah disatukan dan Ia meminta kebijakan non-interferensi dari kekuatan-kekuatan regional seiring dengan menghadapi tantangan ke depan (Pacific Institute of Public Policy, 2008, p. 1).

Pada tahun 1988, Perdana Menteri Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu secara resmi menandatangani serangkaian prinsip yang mengatur tentang negara-negara yang menjadi anggota untuk proses konsultasi dan kerjasama dalam isu-isu kawasan dan internasional. MSG dibentuk berdasarkan "*Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia*" yang ditandatangani di Port Vila pada 14 Maret 1988 (KEMENLU, 2015). Ron May mengatakan bahwa persetujuan tahun 1988 ini kemungkinan didorong








oleh sebuah keinginan untuk menunjukkan dukungan Melanesia terhadap upaya kemerdekaan Kanak di Kaledonia Baru. Peristiwa ini juga mencerminkan persepsi bahwa bekas kekuatan kolonial di *Pasific Islands Forum* (PIF) seperti Australia dan Selandia Baru serta negara-negara Polinesia telah gagal mengambil isu kemerdekaan Kanak ini di Forum PIF secara memadai (May, 2011, pp. 1-2). Kemudian Fiji menyusul bergabung dengan MSG pada tahun 1996.

Pada tanggal 7 Juni 1996 ditandatangani sebuah dokumen yang berjudul sama yaitu "*Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia*", Kiriwana, Trobriand Island, yang isinya menyepakati kerja sama untuk memajukan perekonomian negara anggota. Dalam KTT ke-16 di Goroka, Papua Nugini, 19 Agustus 2005 disepakati pembentukan Sekretariat MSG yang berkedudukan di Port Vila. Keputusan untuk menjadikan MSG sebagai sebuah organisasi sub-regional ditetapkan dalam sebuah perjanjian yang berjudul "*Agreement Establishing the Melanesian Spearhead Group*" yang draftnya telah diselesaikan pada bulan Maret 2007. Dalam Agreement tersebut disepakati untuk menyertakan *Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS)* dari Kaledonia Baru sebagai anggota dengan revisi terhadap pasal 10, 11, dan 12 sesuai dengan pasal 19 ayat 5 (draft) *Agreement* tersebut yang mengatur anggota berstatus sebagai organisasi atau wilayah yang bukan negara merdeka (KEMENLU, 2015). FLNKS merupakan sebuah organisasi politik pribumi dan bukanlah sebuah negara yang berdaulat.

Dalam pembukaan *agreement* ini juga menyatakan solidaritas dan kerjasama kawasan dengan tujuan untuk memperkuat lembaga-lembaga kerjasama kawasan dan internasional. Hal yang menunjukkan keinginan anggota MSG untuk menciptakan sebuah kawasan yang dihormati karena kualitas pemerintahan yang baik, manajemen berkelanjutan atas sumber daya alam, penghormatan dan

promosi kebudayaan, tradisi dan nilai-nilai Melanesia, dan pembelaan dan penegakan kemerdekaan/penentuan nasib sendiri sebagai hak yang tak terbantahkan dari masyarakat pribumi Melanesia dan penegakan HAM mereka. MSG saat ini beranggotakan Fiji, *Front de liberation nationale kanak et socialiste (FLNKS)* Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Tabel 1.2 Daftar Anggota Penuh, Anggota Asosiasi, dan Pengamat di MSG

Nama Negara/Organisasi	Tahun Bergabung	Status
 Fiji	1996	<i>Full Member</i>
 Kaledonia Baru <i>Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS)</i>	2007	<i>Full Member</i>
 Papua Nugini	1988	<i>Full Member</i>
 Kepulauan Solomon	1988	<i>Full Member</i>
 Vanuatu	1988	<i>Full Member</i>
 Indonesia (5 Provinsi)	2011	<i>Associate Member</i>
 West Papua (Papua Barat) <i>United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)</i>	2015	<i>Observer</i>

Sumber : www.msgsec.com

(<http://www.msgsec.info/index.php/members/brief-about-msg>)

MSG juga dibentuk dengan tujuan untuk memberikan suara yang lebih besar bagi negara-negara Melanesia di *Pasific Islands Forum (PIF)*. Saat ini, forum tersebut beranggotakan Australia, Selandia Baru, Fiji, Nauru, Pulau Cooks, Tonga dan Samoa. Beberapa ahli berpendapat meski tujuan jelas MSG adalah memperkuat hubungan ekonomi Melanesia melalui perdagangan dan politik melalui berbagai pertemuan, MSG juga bertujuan menyatukan negara-negara Melanesia untuk melawan dominasi Polinesia di organisasi-organisasi regional di kawasan Pasifik Selatan.

MSG juga mengambil sikap yang tegas sebagai sebuah organisasi Melanesia yang menekankan identitas khas ras Melanesia dan bukan hanya sebagai bekas wilayah koloni melainkan sebuah bentuk identitas lain di Pasifik yang bisa dipahami dalam analisis politik kawasan. Norman McQueen mencatat bahwa meski PIF diakui sebagai organisasi kawasan yang paling penting di kawasan Pasifik Selatan, namun negara-negara Melanesia secara khusus memiliki beberapa posisi dan sikap yang berbeda dengan negara-negara Polinesia mereka dalam beberapa isu kawasan dan internasional. McQueen mengatakan bahwa Melanesia semakin merasa terasingkan setelah apa yang mereka lihat sebagai sikap konservatisme diplomatis dari negara-negara Polinesia terutama dalam isu-isu tertentu yang berkaitan dengan negara bekas penjajah, contohnya seperti percobaan nuklir yang dilakukan Perancis di Kaledonia Baru (McQueen, 1993, p. 145).

McQueen juga memiliki sebuah kecurigaan bahwa negara-negara Melanesia menganggap negara-negara Polinesia lebih konservatif dan tidak terlalu berkomitmen terhadap regionalisme luas di kawasan Pasifik Selatan. Negara-negara Melanesia menganggap bahwa negara-negara Polinesia lebih suka untuk tetap berada di bawah bayang-bayang kolonial. Kemudian kehadiran negara-negara Polinesia yang lebih besar jumlahnya di PIF

merupakan penghalang bagi potensi negara-negara Melanesia untuk menyuarakan suaranya (McQueen, 1991, p. 169).

A. Sejarah Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Melanesia

1. Kawasan Pasifik sebagai “Halaman Belakang”

Pada masa awal dekolonilasi di kawasan Pasifik Selatan 1960-1980an, termasuk negara-negara Melanesia didalamnya. Indonesia saat itu juga sedang mengalami pergantian rezim pemerintahan, yaitu dari Orde Lama dibawah pemerintahan Presiden Soekarno ke Orde Baru dibawah pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1967. Di masa peralihan tersebut, Presiden Soeharto yang juga dijuluki sebagai “Bapak Pembangunan” menginginkan adanya kemajuan yang pesat di bidang perekonomian dan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebutlah yang menyebabkan politik luar negeri Indonesia lebih dcondongkan ke Barat (Amerika Serikat dan Eropa) serta organisasi regional negara-negara kawasan Asia Tenggara, yaitu ASEAN.

Seperti yang diketahui bahwa lingkaran konsentris politik luar negeri selama ini memang lebih condong ke Barat (Amerika Serikat dan Eropa) serta ASEAN+3 (Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok). Hal tersebut ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang dicantumkan di laman *websitenya* (KEMENLU, 2015). Sedangkan Timur (Negara-negara di Samudera Pasifik atau Oseania) cenderung dianggap sebagai “halaman belakang” bagi Indonesia, kecuali Australia dan Selandia Baru. Hal tersebut terjadi karena negara-negara di kawasan Pasifik merupakan negara *micro state*, yang mana selain wilayahnya yang kecil dari segi ekonomi juga kurang menguntungkan bagi Indonesia, kemudian dari segi politik internasional negara-negara tersebut juga tidak memiliki *power*. Sehingga wajar jika Indonesia sedikit mengabaikan

negara-negara tersebut, termasuk negara-negara Melanesia didalamnya.

Meskipun demikian, Indonesia tetap menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Melanesia yang berdaulat, meskipun hubungan tersebut bisa dianggap sebagai “formalitas” karena tidak ada perjanjian ataupun kerjasama yang progresif dan berkelanjutan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Indonesia sendiri telah menjalin hubungan diplomatik dengan Fiji sejak 1984, dengan Kepulauan Salomon sejak 1985, dengan Kaledonia Baru sejak 1983, Papua Nugini sejak 1975, dan Vanuatu sejak 1987 (Bantarto, 1994, p. 34). Bahkan Indonesia juga memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Fiji, Kaledonia Baru, dan Papua Nugini.

Indonesia mulai memandang posisi negara-negara Melanesia ketika mereka turut mendesak pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM dan mendukung kemerdekaan Timor Timur melalui PBB. Pandangan negara-negara Pasifik Selatan banyak dipengaruhi oleh pemerintah Australia dan Selandia Baru, akibat tidak adanya komunikasi langsung antara Indonesia dan negara-negara Pasifik Selatan tersebut. Pada akhir tahun 1983, Indonesia mulai mengadakan komunikasi langsung dengan negara-negara Pasifik Selatan termasuk negara-negara Melanesia, seperti ke Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Salomon, Samoa Barat, dan Selandia Baru, dimana kunjungan ini Indonesia mempunyai kepentingan yang utama adalah untuk mencari dukungan dari negara-negara Pasifik Selatan dalam masalah Timor-Timur dalam sidang Majelis Umum PBB akhir tahun 1983 (Bantarto, 1994, p. 40).

Selain itu, kepentingan Indonesia juga untuk meningkatkan hubungan kerja sama Indonesia di kawasan tersebut, dimana Indonesia menawarkan bantuan dalam kerangka program kerjasama teknik antar negara berkembang (*Technical Corporation Amongs Developing*

Countries) yang ingin membantu negara berkembang lainnya di Pasifik Selatan. Selain kepentingan utama tersebut, Indonesia juga ingin menunjukkan ke Pasifik Selatan bahwa Indonesia adalah negara yang bersahabat dan mau diajak berkerjasama untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya serta untuk menciptakan stabilitas perdamaian di kawasan ini.

Namun pada akhirnya, pemerintah Indonesia yang saat itu dibawah pemerintahan Presiden Habibie yang menggantikan posisi Presiden Soeharto yang mengundurkan diri tak kuasa untuk menahan desakan internasional, pada akhirnya di tahun 1999 melaksanakan referendum di Timor Timur untuk memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan status otonomi khusus atau merdeka. Indonesia pada akhirnya harus merelakan melepas wilayah Timor Timur menjadi negara merdeka Timor Leste dengan hasil referendum 21,50% pro-Indonesia dan 78,50% pro-kemerdekaan. Provinsi ke-27 Indonesia tersebut akhirnya memperoleh status resminya sebagai negara anggota PBB pada 20 Mei 2002 (Firman, 2016).

2. Kebijakan “*Look East Policy*”

Setelah peristiwa referendum Timor Timur yang menyebabkan Indonesia kehilangan wilayah Timor Timur, Indonesia mulai melirik kawasan yang selama dianggap sebagai “halaman belakang”, yaitu negara-negara di kawasan Pasifik Selatan (termasuk negara-negara Melanesia didalamnya). Indonesia mulai menyadari bahwa negara-negara *micro state* apabila bersatu dan solid juga akan menjadi sebuah *power* dalam politik internasional dan akan memberikan pengaruh dalam forum-forum internasional. Sehingga Indonesia perlu untuk membuat suatu kebijakan politik luar negeri khusus untuk kawasan Pasifik Selatan.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Ia mengeluarkan sebuah kebijakan politik

luar negeri baru bagi Indonesia, yaitu “*Look East Policy*” atau Kebijakan Melihat ke Timur (Kawasan Pasifik Selatan atau Oseania). Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dengan menghadirkan Indonesia di kawasan tersebut, salah satu cara yang diambil yaitu melibatkan diri ke dalam organisasi regional kawasan tersebut, yaitu *Pacific Islands Forum (PIF)* dimana Indonesia resmi diterima sebagai mitra dialog di organisasi regional tersebut pada tahun 2001 (KEMENLU, 2015).

Gambar 1.3 Logo Pasific Islands Forum




























Sumber : www.forumsec.org

(<http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/>)

Pacific Islands Forum (PIF) didirikan pada tahun 1971 dengan nama *South Pacific Forum (SPF)*. PIF sendiri memiliki 18 negara anggota, diantaranya yaitu: Australia, Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Kaledonia Baru, Kepulauan Salomon, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Polinesia Perancis, Samoa, Selandia Baru, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. Selain anggota tetap tersebut, PIF juga mempunyai 18 negara sebagai *observer* sekaligus mitra dialog, diantaranya yaitu: Amerika Serikat, China, Filipina, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Kuba, Malaysia, Perancis, Taiwan, Thailand, Turki, Spanyol, dan Uni Eropa (FORUM SEC, 2015).

Tabel 1.3 Anggota, Anggota Asosiasi, Pengamat, dan Mitra Dialog dari PIF

<i>Member States</i>			
 Australia	 Cook Islands	 Fiji	 French Polynesia
 Kiribati	 Marshall Islands	 Micronesia	 Nauru
 New Caledonia	 New Zealand	 Niue	 Palau
 Papua New Guinea	 Samoa	 Solomon Islands	 Tonga
 Tuvalu	 Vanuatu		
<i>Associate members</i>	<i>Observers</i>		
 Tokelau	 American Samoa	 Guam	 Northern Mariana Islands
	 Timor-Leste	 Wallis and Futuna	 United Nations
	Asian Development Bank	Commonwealth of Nations	WCPFC
	World Bank		

<i>Dialogue Partners</i>			
 Canada	 China	 Cuba	 European Union
 France	 India	 Indonesia	 Italy
 Japan	 South Korea	 Malaysia	 Philippines
 Spain	 Taiwan	 Thailand	 Turkey
 United Kingdom	 United States		

Sumber : www.forumsec.org
(<http://www.forumsec.org/pages.cfm/about-us/>)

PIF sendiri memiliki kantor kesekretariatan yang bemarkas di Suva, Fiji. Mandat Sekretariat disampaikan melalui Pertemuan Pemimpin tahunan dan keputusan rapat tingkat menteri tingkat tinggi. Semenjak tahun 1989, dilaksanakan agenda *Post Forum Dialogue (PFD)* yang merupakan Pertemuan rutin antara PIF dengan negara-negara mitra dialog dan organisasi-organisasi terpilih yang dilakukan setelah Pertemuan para pemimpin PIF. Organisasi regional PIF ini memiliki arti penting bagi Indonesia, hal tersebut tercantum dalam *website* resmi Kemenlu RI, yaitu :

- Keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy.
- Kehadiran Indonesia dalam Pertemuan PFD-PIF, merupakan bagian dari upaya untuk mendekatkan

diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, khususnya dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

- Keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam fora internasional (KEMENLU, 2015).

B. Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Melanesia pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

1. *Million Friends Zero Enemy*

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode atau selama 10 tahun, yaitu dari tahun 2004-2014. Pada masa pemerintahan SBY, pada masa pemerintahannya Indonesia menggunakan 9 (Sembilan) doktrin yang disebut oleh Velix Wanggai dalam disertasinya sebagai “*The Yudhoyono Doctrine*”, salah satu doktrin yang terkenal yaitu “*A Million Friends Zero Enemy*” atau “Satu Juta Teman Tidak Memiliki Musuh” (Maulana, 2017). Dengan doktrin dari Presiden SBY tersebut Indonesia lebih menekankan pada politik bebas aktif tanpa mengikuti arus manapun dan yang terpenting yaitu *good images* atau dapat dikatakan bahwa bagi Presiden SBY citra baik Indonesia sangat penting bagi politik luar negeri Indonesia. Sehingga Indonesia mencoba membuka hubungan bilateral yang baik dengan semua negara, namun tetap memfokuskan pada lingkaran konsentris politik luar negeri Indonesia, yaitu ASEAN dan Barat (Amerika Serikat dan Eropa).

Kebijakan Presiden SBY terhadap negara-negara Melanesia cenderung melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Megawati sebelumnya yaitu “*Look East Policy*”, tanpa adanya peningkatan yang signifikan terutama di periode pertama kepemimpinannya.

Pada periode kedua yaitu tahun 2009-2014 baru mulai terlihat hubungan yang digalang antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia, terutama setelah mengemukakan isu pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dunia internasional.

Dalam masa pemerintahan Presiden SBY Indonesia terus hadir di forum PIF sebagai mitra dialog, kemudian untuk memperbaiki citra Indonesia dihadapan negara-negara Melanesia Presiden SBY mulai melakukan pendekatan, baik melalui hubungan bilateral maupun melalui forum-forum internasional. Tercatat Presiden SBY melakukan kunjungan ke Papua Nugini pada 12 Maret 2010, pada kesempatan tersebut kedua negara membahas soal keamanan perbatasan, kerja sama kehutanan, pertanian dan perdagangan. Presiden Yudhoyono juga mendapat penghargaan *Grand Companion of The Order of Hogolu* dari PM Somare yang diberikan atas jasanya memperbaiki hubungan Indonesia dan Papua Nugini (Setiadi, 2010).

Kemudian Presiden SBY menerima kunjungan PM Vanuatu pada tahun 21 Desember 2011 di Istana Bogor dan dalam kesempatan tersebut kedua negara membicarakan peluang kerjasama baru antar kedua negara (Pambudi, 2011), kemudian Presiden SBY melalui Kementerian Luar Negeri mengirimkan delegasi ke ke KTT MSG ke-18 dan menjadi *observer* di organisasi sub-regional tersebut pada tahun 2011, dengan menjadi *observer* dalam MSG, Indonesia akan dapat bekerja sama lebih erat dan memberikan kontribusinya kepada negara-negara anggota MSG baik dalam bentuk kerja sama ekonomi dan teknik, termasuk program *capacity building* maupun bantuan teknis lainnya (KEMENLU, 2015).

Presiden SBY juga pernah menerima kunjungan PM Kepulauan Salomon Gordon Darcy sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2013 di Istana Bogor dan pada tahun 2014 di Jakarta, pada kedua kesempatan tersebut kedua

negara membahas tentang kerjasama ekonomi dan untuk membangun persahabatan yang didasarkan kepada penghormatan atas kedaulatan masing-masing negara (Iskandar, 2014). Kemudian menerima PM Papua Nugini pada 17 Juni 2013 pada kesempatan tersebut Presiden SBY dan PM Papua Nugini menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman di berbagai bidang oleh para menteri (Gatra, 2013).

Pada 17 Juni 2014 Presiden SBY mengunjungi Fiji yang sekaligus menjadi Presiden Indonesia pertama yang mengunjungi negara di Pasifik Selatan tersebut. Ada dua agenda dalam kunjungan tersebut, yaitu *pertama*, melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Fiji Ratu Epeli Nailatikau dan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Fiji Voreqe Josaia Bainimarama. *Kedua*, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi *The Pacific Islands Development Forum* ke-2 dan Presiden SBY akan menyampaikan *major a policy speech* (TEMPO, 2014).

2. Isu Pelanggaran HAM di Papua

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu pelanggaran HAM di Papua semakin kuat berhembus di dunia internasional. Sehingga hal tersebut menjadi “citra buruk” bagi Indonesia, hal yang tentu saja merugikan posisi Indonesia di dunia internasional. Isu pelanggaran HAM dihembuskan oleh Benny Wenda, seorang aktivis pro kemerdekaan Papua yang saat ini bermukim di London, Inggris. Benny memanfaatkan solidaritas Melanesia dan negara-negara di Pasifik Selatan untuk meraih dukungan untuk kemerdekaan Papua Barat (*West Papua*). Hal tersebut mendapat beragam tanggapan, namun sebagian besar negara-negara Pasifik Selatan termasuk negara-negara Melanesia mendukung upaya tersebut (Widjojo, 2010).

Tercatat beberapa kali isu Papua menjadi bahan pembicaraan dalam forum-forum internasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *Pacific Islands Forum*

(PIF), dan *Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Dukungan datang mayoritas berasal dari negara-negara Pasifik Selatan yang termasuk negara-negara Melanesia didalamnya. Pada bulan Juni 2010, Parlemen Vanuatu telah mengesahkan Undang-undang Wantok Bilong Yumi (*the Wantok Bilong Yumi Bill*) untuk mendukung perjuangan Papua Barat untuk merdeka dari Indonesia, mengikat Vanuatu ke dalam perjuangan untuk mendorong status pengamat (*observer*) Papua Barat di dalam MSG dan PIF. Editorial harian *Islands Business* berjudul “*Capturing the pan Melanesian Spirit*” melaporkan bahwa undang-undang Vanuatu ini merupakan perkembangan yang sangat bersejarah dalam konteks dukungan resmi di dalam komunitas persaudaraan Melanesia untuk perjuangan Papua Barat (Chand, 2010).

Isu Papua inilah yang sebenarnya menjadi batu pengganjal dalam upaya peningkatan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Melanesia. Sebenarnya pemerintah Indonesia dibawah Presiden SBY tidak tinggal diam melihat tersebut, terlebih “citra buruk” Indonesia karena isu ini bisa mempengaruhi posisi Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional serta pengalaman pahit lepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diakibatkan oleh desakan internasional.

Dalam beberapa kesempatan Presiden SBY secara langsung maupun melalui Kementerian Luar Negeri menjawab maupun membantah tuduhan yang dialamatkan kepada Indonesia mengenai isu pelanggaran HAM di Papua. Pada Sidang Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke 25 tahun 2014 silam, Indonesia mendapat kecaman dari Vanuatu tentang isu pelanggaran HAM di Papua, dalam pidatonya PM Vanuatu Moana Carcasses Katokai Kalosil menyampaikan bahwa hingga saat ini di Papua masih terjadi pelanggaran HAM berat dan rakyat Papua masih tertindas di tanah airnya sendiri.

Delegasi Indonesia yang dipimpin Dian Triansyah Djani (Wakil Tetap RI untuk PBB) pada kesempatan itu menggunakan hak jawab atas pernyataan yang dibuat oleh Vanuatu. Pemerintah Republik Indonesia secara tegas menolak pernyataan yang berkaitan dengan apa yang disebut ‘masalah Papua’ yang disajikan oleh Perdana Menteri Vanuatu. Menurutnya Papua telah dipolitisir dan digunakan sebagai bahan kampanye oleh berbagai partai politik dan gerakan politik bukan untuk kepentingan orang Papua tetapi lebih untuk pemilu dan propaganda politik di Vanuatu itu sendiri (BATAS NEGERI, 2014).

Kemudian Presiden SBY saat menjadi *major a policy speech* dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi *The Pacific Islands Development Forum* ke-2 tahun 2014 di Fiji, Presiden SBY menyampaikan kondisi Papua terkini kepada perwakilan 16 perwakilan negara yang hadir termasuk negara-negara Melanesia didalamnya (IRIB Indonesia, 2014). Forum ini pernah dijadikan oleh kelompok pro Papua Merdeka untuk mendulang dukungan negara-negara Pasifik, sehingga pemerintah Indonesia merasa perlu untuk hadir dan menyampaikan kondisi yang sebenarnya di Papua (DETIK, 2014).

Sebelum Presiden SBY menyambut perwakilan dari anggota MSG yang datang ke Indonesia dan mengunjungi Papua pada 15 Januari 2014. Perwakilan tersebut di antaranya Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Inoke Kubuabola, Menteri Luar Negeri Papua Niugini Rimbink Pato, dan Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon Soalagi Clay Forau. Hadir pula perwakilan dari *Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS)* atau Front Pembebasan Nasional Bangsa Kanak, Yvon Fuaa, serta pejabat tinggi MSG, HE Kaliopate Tavola (Rastika, 2014). Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyampaikan bah misi ini untuk meningkatkan pemahaman di Papua dan Papua Barat. Misi ini diharapkan memberikan rekomendasi pada para pemimpin MSG tentang keterwakilan kelompok WPNCL (*West*

Papua National Coalition for Liberation) (DETIK, 2014).

Meskipun isu Papua menyebabkan “citra buruk” bagi Indonesia di dunia internasional, tetapi dengan isu tersebut juga membuat pemangku kepentingan di Indonesia sadar bahwa di Timur Indonesia juga terdapat negara-negara yang sebenarnya bisa menguntungkan bagi Indonesia, baik dari segi ekonomi, keamanan kawasan, maupun politik internasional. Kemudian isu tersebut juga membuat pemerintah Indonesia lebih memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.